



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernadhi Sudarmanto  
Jabatan : Direktur Investigasi Instansi Pemerintah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Iswan Elmi  
Jabatan : Deputy Kepala BPKP Bidang Investigasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 20 Januari 2017  
Pihak Pertama,

Iswan Elmi  
NIP 19600127 198102 1 001

Ernadhi Sudarmanto  
NIP 19650704 198503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**DIREKTORAT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
<b>A</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja Program</b>			
1.	Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	1.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian dimanfaatkan di persidangan	%	40
		1.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70
		1.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	2.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50
		2.2	Persentase auditor yang memiliki kompetensi ( <i>hard &amp; soft competency</i> ) di bidang pencegahan	%	60
3.	Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	3.1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60
4.	Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah di bidang keinvestigasian	4.1	Persentase auditor yang memiliki kompetensi keinvestigasian	%	60
<b>B</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>			
1.	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah	1.1	Jumlah laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara	Laporan	6
		1.2	Jumlah laporan Pengumpulan dan Evaluasi Bukti Dokumen Elektronik (PEBDE)	Laporan	4
		1.3	Jumlah laporan pemberian keterangan ahli	Laporan	14
		1.4	Jumlah laporan hasil audit investigatif	Laporan	2
		1.5	Jumlah laporan FCP	Laporan	1

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1.6	Jumlah laporan pemantauan/ monitoring/QA	Laporan	62
1.7	Jumlah laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis	Laporan	2
1.8	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kompetensi keinvestigasian	Orang	150

Kegiatan

1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga

Anggaran

Rp. 1,606,000,000.00

Deputi Kepala BPKP  
Bidang Investigasi



Iswan Elmi  
NIP 19600127 198102 1 001

Jakarta, 20 Januari 2017  
Direktur,



Ernadhi Sudarmanto  
NIP 19650704 198503 1 001

